

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan pentingnya *Special Arrangements* antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea dalam mengelola wilayah perbatasan, yang tidak hanya dipandang sebagai batas fisik antara dua negara, tetapi sebagai ruang yang dinamis yang menghubungkan masyarakat kedua belah pihak. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat perbatasan untuk terus menjalankan kegiatan dan kebiasaan tradisional lintas batas yang sudah ada lama sebelum batas modern ada dengan lebih fleksibel, tanpa terhambat oleh prosedur administratif yang kompleks. Salah satu contoh konkret dari kebijakan ini adalah Kartu Lintas Batas (KLB), yang memberikan akses sah kepada masyarakat perbatasan untuk melintasi perbatasan dan berinteraksi dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam konteks teori *Transborder Governance* yang digunakan dalam penelitian ini, ada empat lensa analitis yang penting untuk memahami dinamika wilayah perbatasan. Lensa pertama, *Market Forces and Trade Flows*, menunjukkan bagaimana kekuatan pasar dan arus perdagangan di wilayah perbatasan tidak sepenuhnya terikat oleh kebijakan formal negara. Pasar Rakyat Skouw di Indonesia, sebagai contoh, menjadi pusat ekonomi penting bagi masyarakat Papua New Guinea, yang berbelanja kebutuhan pokok di sana karena harga yang lebih murah dan akses yang lebih mudah dibandingkan dengan pasar di sisi Papua New Guinea.

Lensa kedua, *Policy Activities of Multiple Levels of Governments*, menekankan peran koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, baik nasional, provinsi, hingga lokal—dalam mengelola wilayah perbatasan. Forum seperti *Joint Border Committee (JBC)* dan *Border Liaison Meeting (BLM)* memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat perbatasan dan memastikan keamanan serta kelancaran aktivitas lintas batas. Kedua forum ini mempertemukan pejabat dari kedua negara dan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap situasi yang dihadapi di lapangan.

Lensa ketiga, *Particular Political Clout of Borderland Communities*, menggambarkan bagaimana masyarakat perbatasan memiliki kekuatan politik yang mempengaruhi kebijakan terkait wilayah mereka. Komunitas perbatasan, dengan ikatan budaya yang kuat dan aktivitas lintas batas yang telah berlangsung lama, memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh kedua negara. Forum-forum seperti BLM memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan masalah yang dihadapi, yang kemudian dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah.

Lensa terakhir, *The Specific Culture of Borderland Communities*, menunjukkan bahwa budaya komunitas perbatasan memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan lintas batas. Masyarakat perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, meskipun terpisah oleh batas negara, memiliki tradisi dan hubungan kekerabatan yang kuat. Kebijakan *Special Arrangements* mengakomodasi kebutuhan budaya ini dengan memberikan akses yang sah bagi masyarakat untuk

menjalankan kegiatan adat mereka tanpa terhambat oleh prosedur imigrasi yang rumit, seperti yang tercermin dalam pemberian KLB.

Secara keseluruhan, *Special Arrangements* bukan hanya berfungsi sebagai kebijakan pengelolaan perbatasan yang fleksibel dan responsif, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kedaulatan negara sembari mengakomodasi kebutuhan masyarakat perbatasan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Pengelolaan perbatasan yang terbilang cukup membantu masyarakat perbatasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lintas batas tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada pemahaman terhadap dinamika lokal yang terjalin antara masyarakat kedua negara. Dengan mengintegrasikan teori *Transborder Governance* melalui empat lensa tersebut, Indonesia dan Papua New Guinea dapat memperkuat hubungan bilateral mereka, menjaga stabilitas wilayah perbatasan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan masyarakat yang hidup di kawasan tersebut.

4.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya dalam konteks kerjasama lintas negara. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan *Special Arrangements* dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan.

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi penerapan teori *Transborder Governance* dalam pengelolaan perbatasan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk analisis kebijakan multi-level governance yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian selanjutnya juga bisa menyoroti dinamika interaksi lintas batas dalam mengelola perdagangan, budaya, dan masyarakat di kawasan perbatasan.

Penulis berharap penelitian mendatang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai berbagai dimensi perbatasan, termasuk pengelolaan keamanan, kebijakan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Diharapkan bahwa kebijakan lintas batas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, menjaga kedaulatan negara, serta menciptakan stabilitas dan kemakmuran di wilayah perbatasan.